

PROGRAM KOPERASI MERAH PUTIH DI KECAMATAN PASEMAH AIR KERUH : Langkah Awal Implementasi Kebijakan

Restah Intan Tri Ristu¹⁾; Desita Rahayu²⁾; Devy Marjoyo³⁾; M Riski Kusuma Bakti⁴⁾
Study Program of Administration Public
Department of Administration Publik
STIA Bengkulu

Email: restahintantriristu@gmail.com¹⁾; desitanasattar@gmail.com²⁾; devy@stiabengkulu.ac.id³⁾

ARTICLE HISTORY

Received [20 November 2025]

Revised [25 Desember 2025]

Accepted [31 Januari 2026]

KEYWORDS

Kebijakan Publik, Implementasi, Koperasi, Koperasi Merah Putih, Pasemah Air Keruh

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis prinsip kekeluargaan. Namun, banyak koperasi di Indonesia masih menghadapi kendala dalam hal pengelolaan dan pemberdayaan anggotanya. Program Koperasi Merah Putih (KMP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas koperasi, meningkatkan digitalisasi, serta mengembangkan koperasi modern di daerah. Implementasi Program Koperasi Merah Putih di Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan sudah mulai berjalan. Pengamatan yang dilakukan dengan paradigma kualitatif mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi program didukung oleh komunikasi yang baik antar pelaksana dan dukungan masyarakat. Namun, pada tahap awal ini ditemukan beberapa tantangan pada aspek sumber daya manusia, infrastruktur, serta kurangnya pembinaan dan pendampingan teknis. Program ini juga mengindikasikan kebutuhan akan koordinasi dan adaptasi kebijakan terhadap kondisi lokal.

ABSTRACT

Cooperatives are economic institutions that play a vital role in improving community welfare based on the principle of kinship. However, many cooperatives in Indonesia still face challenges in managing and empowering their members. Koperasi Merah Putih Program (KMP) is a government policy implemented through the Ministry of Cooperatives and SMEs, aimed at strengthening cooperative capacity, increasing digitalization, and developing modern cooperatives in the regions. Implementation of KMP in Pasemah Air Keruh District, Empat Lawang Regency, South Sumatra, has begun. Qualitative observations indicate that the program's successful implementation is supported by good communication between implementers and community support. However, several challenges were identified in the initial stages, including human resources and infrastructure, as well as a lack of training and technical assistance. The program also indicates the need for coordination and policy adaptation to local conditions.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang masih dihadapkan pada berbagai permasalahan ekonomi dan sosial, salah satunya adalah rendahnya kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap modal, pasar, dan kemampuan manajerial pelaku usaha kecil. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah terus berupaya memperkuat sektor

ekonomi rakyat melalui kebijakan pemberdayaan koperasi. Koperasi dipandang sebagai lembaga ekonomi yang mampu menjadi penggerak pembangunan ekonomi daerah berdasarkan prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Menurut (Anda et al., 2023) keberhasilan suatu program pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dirancang di tingkat pusat, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana di daerah dalam memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah terus berupaya memperkuat sektor ekonomi rakyat melalui kebijakan pemberdayaan koperasi.

Program Koperasi Merah Putih (KMP) merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang dicanangkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendorong transformasi koperasi tradisional menjadi koperasi modern, digital, dan berdaya saing. Program ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas manajerial koperasi, memperluas jaringan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan anggota. Namun, implementasi program di daerah sering kali menemui kendala, baik dari sisi sumber daya, koordinasi birokrasi, maupun partisipasi masyarakat.

Kecamatan Pasemah Air Keruh di Kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu daerah yang menjadi lokasi implementasi Program KMP. Wilayah ini memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, namun keterbatasan infrastruktur dan rendahnya literasi koperasi menjadi tantangan tersendiri. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa dari lima belas desa sasaran program, hanya satu desa yang berhasil mengimplementasikan kegiatan koperasi secara aktif, sedangkan desa lainnya belum mampu menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan program.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Program Koperasi Merah Putih di Kecamatan Pasemah Air Keruh. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana keberhasilan dan kegagalan implementasi Program Koperasi Merah Putih di Kecamatan Pasemah Air Keruh.

LANDASAN TEORI

Implementasi kebijakan publik merupakan proses penting dalam menentukan keberhasilan suatu program. Implementasi diartikan sebagai tahapan penerapan kebijakan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Menurut Edwards III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu:

1. Komunikasi, yang berarti sejauh mana pelaksana memahami isi kebijakan;
2. Sumber daya, yang meliputi ketersediaan sumber daya manusia, finansial, dan sarana prasarana;
3. Disposisi atau sikap pelaksana, yang mencerminkan komitmen serta motivasi pelaksana kebijakan; dan
4. Struktur birokrasi, yang mencakup prosedur dan mekanisme pelaksanaan kebijakan.

Keempat faktor tersebut menjadi acuan dalam menilai sejauh mana kebijakan publik dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, teori implementasi Edwards III digunakan untuk menganalisis keberhasilan dan kegagalan Program Koperasi Merah Putih di Kecamatan Pasemah Air Keruh.

Selain teori implementasi kebijakan, penelitian ini juga menggunakan teori kelembagaan koperasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Transformasi Koperasi Modern. Menurut undang-undang tersebut, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Program Koperasi Merah Putih (KMP) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperkuat kelembagaan koperasi serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional berbasis digital. Program ini diarahkan untuk mempercepat proses transformasi koperasi agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan mampu berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 60 Tahun 2021 tentang Strategi Percepatan Transformasi Digital Koperasi, tujuan utama Program KMP adalah:

- a. memperkuat tata kelola kelembagaan koperasi yang transparan dan akuntabel;

- b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi melalui pelatihan dan pendampingan;
- c. mendorong digitalisasi sistem koperasi agar lebih efisien dan terintegrasi;
- d. memperluas akses pembiayaan dan kemitraan usaha koperasi; serta
- e. meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi melalui usaha produktif dan inklusif.

Implementasi Program Koperasi Merah Putih diamati dengan melihat empat dimensi utama sebagaimana teori Edwards III, yaitu:

1. Komunikasi antara pelaksana kebijakan dan masyarakat penerima manfaat;
2. Sumber daya yang mendukung pelaksanaan program (SDM, dana, dan fasilitas);
3. Disposisi pelaksana, meliputi motivasi dan komitmen dalam menjalankan program;
4. Struktur birokrasi, yaitu mekanisme koordinasi antar-lembaga dan prosedur pelaksanaan program.

Empat dimensi tersebut digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan implementasi Program Koperasi Merah Putih di Kecamatan Pasemah Air Keruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam, mengungkap makna di balik perilaku dan interaksi sosial, serta menganalisis konteks yang mempengaruhi implementasi kebijakan di lapangan. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti menjadi instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, dan analisis data bersifat induktif. Menurut Creswell (2015), studi kasus merupakan strategi penelitian yang menyelidiki fenomena dalam batasan konteks kehidupan nyata dengan menggunakan berbagai sumber informasi. Dalam penelitian ini, studi kasus difokuskan pada implementasi Program Koperasi Merah Putih (KMP) di Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang, sebagai representasi dari daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T).

Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan secara *purposive sampling*. Teknik ini merupakan salah satu bentuk sampling non-probabilitas yang bertujuan untuk memilih individu atau kelompok secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian.

Menurut Creswell (2015) *purposive sampling* atau *criterion-based selection* digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam fenomena yang diteliti. Informan dipilih karena mereka mampu memberikan informasi yang kaya dan mendalam yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari pengurus koperasi, aparat kecamatan, perangkat desa, dan anggota masyarakat penerima manfaat program. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi dan studi dokumentasi untuk memperkuat data yang diperoleh. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini, tiga teknik triangulasi yang digunakan adalah:

1. Triangulasi Sumber: Membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda (misalnya, membandingkan hasil wawancara dengan pengurus, anggota, dan pemerintah desa).
2. Triangulasi Metode: Mengecek konsistensi data dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda (wawancara, observasi, dan studi dokumen) untuk mengkaji fenomena yang sama.
3. Triangulasi Peneliti: Melibatkan diskusi dan konsultasi dengan rekan sejawat atau pembimbing untuk meninjau ulang temuan sementara dan mengevaluasi kemungkinan adanya bias dalam interpretasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Koperasi Merah Putih (KMP) di Kecamatan Pasemah Air Keruh masih cenderung menghadapi banyak tantangan di beberapa wilayah sasaran. Dari lima belas desa yang ditetapkan sebagai lokasi program, baru satu desa yang mengindikasikan tahap awal keberhasilan menjalankan kegiatan koperasi secara aktif dan produktif. Sementara itu, desa lainnya mengalami berbagai kendala baik dari sisi sumber daya manusia, fasilitas, maupun dukungan kelembagaan. Analisis hasil penelitian ini didasarkan pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang meliputi empat aspek utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kecamatan, pengurus koperasi, dan masyarakat penerima manfaat, ditemukan bahwa informasi mengenai Program Koperasi Merah Putih belum tersampaikan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi program hanya dilakukan pada tahap awal dan bersifat terbatas, sehingga banyak anggota koperasi yang tidak memahami tujuan dan mekanisme program secara jelas. Meskipun demikian, di beberapa desa yang aktif, seperti Desa Keban Jati, komunikasi antara pelaksana dan masyarakat berjalan dengan baik karena adanya peran tokoh masyarakat yang menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan pengurus koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif mampu memperkuat pemahaman pelaksana dan mendorong partisipasi anggota koperasi.

2. Sumber Daya

Faktor sumber daya cenderung menjadi tantangan dalam pelaksanaan Program KMP. Banyak koperasi di Kecamatan Pasemah Air Keruh yang sumber daya manusianya terbatas baik dari segi pendidikan maupun pengalaman dalam pengelolaan koperasi, sehingga perlu peningkatan kompetensi di bidang administrasi, keuangan, dan teknologi. Selain itu, keterbatasan dana operasional dan sarana pendukung seperti jaringan internet dan perangkat digital menghambat proses transformasi koperasi menuju sistem digital. Keterbatasan ini berimplikasi pada lambatnya pelaksanaan kegiatan usaha koperasi, rendahnya inovasi, serta ketidakmampuan koperasi dalam mengelola modal dan melakukan laporan keuangan secara transparan. Temuan ini sejalan dengan variabel sumber daya menurut Edwards III, di mana kebijakan sulit berhasil apabila pelaksana tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan program.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi atau sikap pelaksana juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Program KMP. Berdasarkan hasil wawancara, sikap dan motivasi pengurus koperasi berbeda-beda antar desa. Pada koperasi yang berhasil, pengurus menunjukkan sikap tanggap, memiliki komitmen yang tinggi, serta mampu berinovasi meskipun dengan keterbatasan fasilitas. Namun di beberapa desa lain, pelaksana program menunjukkan sikap pasif dan bergantung pada bantuan pemerintah. Kurangnya pendampingan dan supervisi dari instansi terkait juga menyebabkan motivasi pelaksana menurun. Menurut Edwards III, sikap dan komitmen pelaksana sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Ketika pelaksana tidak memiliki kemauan yang kuat, maka kebijakan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan, meskipun sumber daya tersedia.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi Program KMP di Kecamatan Pasemah Air Keruh sudah ada namun perlu peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, dinas koperasi, dan pengurus koperasi masih lemah. Mekanisme pelaporan dan evaluasi kegiatan membutuhkan pemantauan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program di lapangan. Selain itu, tantangan lain terkait prosedur administrasi yang panjang dan tidak fleksibel dapat membuat beberapa koperasi kesulitan mengakses bantuan atau mengikuti pelatihan. Menurut Edwards III, struktur birokrasi yang kaku dan hierarkis dapat memperlambat proses implementasi kebijakan. Hal ini terlihat jelas dalam pelaksanaan Program KMP, di mana birokrasi yang tidak adaptif menjadi penghambat utama keberhasilan program.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tahap awal pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih (KMP) di Kecamatan Pasemah Air Keruh sudah mengindikasikan realisasi namun masih belum optimal. Berdasarkan empat aspek pelaksanaan kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, masih terdapat beberapa tantangan di lapangan. Dari sisi komunikasi, penyampaian informasi program belum merata sehingga sebagian masyarakat belum memahami tujuan dan mekanisme kegiatan koperasi.

Dari sisi sumber daya, kemampuan pengurus dan sarana pendukung masih terbatas. Pada aspek disposisi pelaksana, sebagian pengurus koperasi sudah memiliki semangat kerja yang baik, namun belum konsisten dalam menjalankan program. Sedangkan dari sisi struktur birokrasi, koordinasi antara pemerintah daerah, dinas koperasi, dan pengurus koperasi masih kurang berjalan dengan baik.

Meskipun demikian, terdapat beberapa koperasi di desa tertentu yang mengindikasikan kemampuannya dalam mengelola program dengan dukungan masyarakat dan pembinaan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa Program Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi instrumen penggerak ekonomi lokal apabila dilakukan pembinaan yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi antar lembaga pelaksana di tingkat daerah.

Saran

Pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih (KMP) di Kecamatan Pasemah Air Keruh dapat berjalan lebih baik apabila proses perencanaan hingga pelaksanaan dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat secara aktif. Oleh karena itu, diperlukan pendataan koperasi dan anggota secara rutin agar kegiatan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan tidak menimbulkan kesenjangan antar desa. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat pembinaan dan pengawasan agar program ini tepat sasaran dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anda, E. G., Rahayu, D., & Ridianto. (2023). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Desa Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal STIA Bengkulu: Committee to Administration for Education Quality*, 2(1), 115–124. <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Creswell, J. W. (2015). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Hasibuan, A. N., Hardana, A., Hasibuan, L., Utami, T. W., & Siregar, S. E. (2023). Penerapan akuntansi publik dalam pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah di Kantor Koperasi Usaha Kecil Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Simki Economic*, 6(2), 288-295.
- Sanjaya, H. G. (2016). ANALISIS KEBERHASILAN KOPERASI AMANAH DI KECAMATAN LANGKAPURA KOTA BANDAR LAMPUNG
- Baihaqi, A. D., NM, A. C., & Pratama, A. W. (2026). Implementasi Koperasi Merah Putih di Kelurahan Gandul: Analisis Komunikasi Kebijakan Antara Pemerintah Kelurahan dan Masyarakat. *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, 1(03).
- Purba, T., & Heryenzus, H. (2017). ANALISIS GAGALNYA KOPERASI DI KOTA BATAM. *JURNAL AKUNTANSI BARELANG*, 2(1), 174-195.
- INSANI, A. E. (2021). Analisis Keberhasilan Koperasi Unit Desa (KUD) Bina Mina Di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

Putra, P. F. (2022). Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Batu). *JPASDEV: Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 3(1), 331-348.